

WACANA E-BLUSUKAN

O l e h

HENDRA KURNIAWAN

SEJAK Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan secara resmi Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, segera muncul keputusan soal prosedur pengamanan bagi keduanya. Jokowi saat ini dikawal oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dari grup D sebanyak 37 personil dengan 7 unit mobil, dan 3 unit motor.

Jokowi sendiri menegaskan bahwa pengawasan hendaknya jangan menjadi pagar pembatas antara dirinya dengan rakyat. Akan tetapi Paspampres yang mengemban tugas melakukan pengawasan untuk menjaga keselamatan diri presiden tentu tidak mau ambil risiko. Paspampres telah bersimulasi bahkan beberapa kali mempraktikkan secara langsung pengawasan saat Jokowi blusukan beberapa waktu yang lalu, namun suasananya berbeda, menjadi kurang cair tidak seperti biasanya. Meskipun tentu saja usaha Paspampres menyesuaikan diri dengan kebiasaan Jokowi ini patut diapresiasi.

Logikanya memang Paspampres diatur oleh presiden, namun kenyataan nantidapat terbalik, atas nama keamanan, presiden dipaksa (terpaksa) 'tunduk' pada aturan-aturan protokol dan standar pengamanan yang digariskan oleh Paspampres. Jika sudah demikian maka muncul pertanyaan: "Apakah kebiasaan Jokowi blusukan untuk menjumpai langsung rakyatnya di daerah-daerah dan kampung-kampung masih mungkin dilakukan dengan bebas?" Padahal gaya Jokowi inilah yang menjadi ciri khas dan melambungkan popularitasnya.

E-Blus

Sekalipun Paspampres mampu memfasilitasi dengan baik blusu-

kanitu, namun dengan status sebagai pemimpin negara yang wilayahnya sangat luas dan jumlah penduduk banyak, blusukan menjadi hal yang mustahil dilakukan secara maksimal. Jokowi mewacanakan untuk mengembangkan e-blusukan atau istilah singkatnya e-blus. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, maka blusukan Jokowi tak lagi harus datang langsung secara fisik untuk bertatap muka dengan rakyat.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini tidak terbendung lagi. Berbagai macam jejaring sosial dengan sekian banyak fitur bermunculan di dunia maya. E-blus tidak harus berbiaya mahal seperti *tele-conference*. E-blus juga dapat dirancang dengan menggunakan media sosial yang sudah ada sekarang, seperti facebook maupun twitter. Kedua media sosial ini relatif familiar karena penggunaannya banyak dan mudah diakses. Tentu kita juga tahu bahwa banyak petinggi negara yang sudah lama menggunakan kedua media sosial itu termasuk presiden. Persoalannya seberapa efektifkah penggunaan media sosial untuk menjaring aspirasi rakyat, mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul satu per satu, sekaligus sebagai media informasi kebijakan pemerintah.

Alih-alih menjadikan e-blus sebagai media penghubung antara rakyat dengan pemimpinnya, yang terjadi justru bisa komunikasi satu arah yang mati dan tanpa hasil. Ini merupakan keniscayaan apabila nantinya Jokowi dengan begitu saja mempercayakan pengelolaan e-blus pada orang lain misalnya pada suatu tim

khusus. Jokowi tetap harus menyempatkan waktu secara rutin untuk mencermati berbagai informasi yang masuk. Solusi nyata yang cepat tanggap tentu sangat diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu e-blus tidak akan optimal jika hanya diterapkan pada tingkat pusat. Pelaksanaan e-blus Jokowi juga harus dibarengi dengan e-blus di daerah-daerah dengan melibatkan para kepala daerah dalam satu jejaring dengan pemerintah pusat.

Ini dapat diwujudkan melalui semacam group terbuka yang dapat diakses masyarakat luas dan di dalamnya dapat dijumpai seluruh kepala daerah di Indonesia dengan admin-nya pemerintah pusat. Tentu akan menjadikurangpas jika sekedar memanfaatkan media sosial yang sudah ada sekarang seperti facebook atau twitter. Indonesia memiliki banyak programmer yang keahliannya tidak diragukan. Alangkah baiknya apabila mereka siap membantu merancang aplikasi e-blus agar menjadi media sosial yang dapat menghubungkan setiap masyarakat dengan pemerintah pusat dan daerah secara efektif. Apabila e-blus yang efektif dan tepat manfaat dapat dilaksanakan dengan baik tentu rakyat akan memiliki relasi yang intim antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Wacana e-blus yang digagas oleh Jokowi akan tetap memberinya kebebasan untuk selalu dekat dengan rakyatnya, hidup dan tinggal di tengah-tengah rakyatnya. Bahkan Jokowi dapat dengan mudah memantau kinerja dan memberi petunjuk pada para kepala daerah demi memenuhi kepentingan rakyat. Jokowi adalah presiden rakyat, maka biarlah dia terus bersama-sama dengan rakyat. (*)